

BAB 8

RENCANA PELAKSANAAN, PERKIRAAN BIAYA, EVALUASI DAN DAN RENCANA KEGIATAN

8.1 Rencana Pelaksanaan

8.1.1 Jadwal Pelaksanaan

Program yang beragam telah diidentifikasi dan diusulkan dalam bab sebelumnya untuk mencapai tujuan setiap komponen. Karena banyaknya masukan keuangan dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program ini, prioritas setiap program telah ditentukan sebagai bagian studi rencana pokok dalam bab sebelumnya. Rencana pelaksanaan setiap program prioritas telah dipersiapkan dengan memperhatikan rencana pelaksanaan program tiap komponen dan hubungan antara program tiap komponen.

Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 1: Pengelolaan Air																													
1-2	Pembangunan irugasi dan rawa secara berkelanjutan																												
1-2-1	Pembuatan target pembangunan propinsi																												
1-2-2	Pelaksanaan Pre F/S																												
1-2-3	Pelaksanaan F/S																												
1-2-4	Pelaksanaan D/D																												
1-3	Pemanfaatn air hujan di daerah pasang surut																												
1-3-1	perstapan																												
1-3-2	Penyediaan penampungan air hujan dari sanitasi																												
1-4	Pengelolaan Budidaya Air																												
1-4-1	Penelitian Metode Solusi																												
1-4-2	Penyebaran Metode																												
1-6	Permodelan Pengelolaan Penggunaan Air																												
1-6-1	Pengembangan Dasar Informasi dan Pengetahuan																												
1-6-2	Pengembangan Permodelan Wadah																												
1-6-3	Permodelan dan Analisis Lingkungan																												

Gambar 8.1.1 Jadwal Pelaksanaan Komponen 1

Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 2: Pengelolaan dataran banjir																													
2-1	Program pengendalian zone dan penggunaan lahan																												
2-1-1	Konfirmasi pengendalian penggunaan tanah																												
2-1-2	Zone area																												
2-1-3	Pelaksanaan																												

Gambar 8.1.2 Jadwal Pelaksanaan Komponen 2

Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Air

No.	Program Prioritas Judul	Tahun ke-1				Tahun ke-2				Tahun ke-3				Tahun ke-4				Tahun ke-5				Tahun ke-6				Tahun ke-7			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 3: Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Aliran Sungai																													
3-1 Penerapan hutan tanaman pada lahan dengan kendala utama																													
3-1-1	Perumusan Proyek																												
	Pembentukan gugus tugas																												
	Pemilihan lokasi proyek																												
	Musyawahar dengan pemimpin setempat																												
3-1-2	Perencanaan dan desain																												
	Penyusunan skema model proyek																												
	Pengorganisasian masyarakat																												
	Inventarisasi kondisi lapangan																												
	Revisi terhadap rencana yang telah ada agar pengelolaan menjadi lebih baik																												
	Penyiapan rencana hutan kemasyarakatan, rencana penanaman oleh petani																												
	Penentuan pembagian wilayah dalam rencana																												
3-1-3	Pelaksanaan proyek																												
	Pelatihan																												
	Penyiapan lahan																												
	Pembangunan check dam																												
	Penyiapan pembibitan dan pemeliharaan																												
	Penanaman pohon																												
	Pemeliharaan hutan/lapangan																												
3-1-4	Pemantauan dan pelaporan																												
	Menyusun skema pemantauan dan evaluasi																												
	Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan																												
	Merevisi skema proyek																												
	Membagi pengalaman melalui komunikasi antar proyek																												
3-3 Penguatan penyuluhan pertanian/perkebunan/kehutanan																													
3-3-1	Perumusan Proyek																												
	Pembentukan gugus tugas																												
	Pemilihan lokasi proyek																												
	Musyawahar dengan pemimpin setempat																												
3-3-2	Pelaksanaan																												
3-4 Penghutanan kembali hutan produksi/hutan tanaman																													
3-4-1	Bimbingan dan komunikasi																												
	Bimbingan bagi perusahaan kehutanan dan penanaman																												
	Pembentukan tim penyidik																												
	Pemantauan kegiatan penghutanan kembali dan pencapaian																												
3-4-2	Kegiatan peningkatan kapasitas																												
	Penyiapan peraturan tingkat provinsi																												
3-4-3	Penegakan hukum																												
	Penyiapan peraturan tingkat provinsi																												
	Konsultasi kepada Pemerintah untuk kebijakan yang lebih kuat/tinggi																												
3-6 Koordinasi dalam dan antar DAS																													
3-7 Rehabilitasi hutan lindung yang telah ada																													
3-7-1	Pembangunan tapak batas hutan																												
	Rekonstruksi batas wilayah hutan																												
	Pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah hutan																												
3-7-2	Pemantauan dan penelitian																												
	Pemilihan wilayah prioritas																												
	Inventarisasi wilayah yang dilindungi																												
	Evaluasi wilayah konservasi																												
	Penyiapan petunjuk habitat																												
3-7-3	Pengembangan sumberdaya manusia																												
	Pembentukan unit pengelola hutan																												
	Penghutanan kembali wilayah terbuka																												
	Pemeliharaan wilayah yang telah dihutankan kembali																												
3-7-4	Penghutanan kembali																												
	Pembuatan jalan patroli, menara pengintai, pintu-pintu																												
3-7-5	Penegakan hukum																												
	Rehabilitasi wilayah hutan yang telah rusak																												
	Pemeliharaan wilayah yang telah direhabilitasi																												

Gambar 8.1.3 Jadwal Pelaksanaan Komponen 3

Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota

Program Prioritas		Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Tahun VI			Tahun VII					
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 4 : Perbaikan Lingkungan Air Kota																									
4 - 1	Pengelolaan drainase masyarakat																								
4-1-1	Model proyek																								
4-1-2	Pemantauan proyek yang telah lewat																								
4-1-3	Pelaksanaan standar																								
4 - 3	Rehabilitasi saluran drainase utama																								
4-3-1	Pembentukan sistem rehabilitasi																								
4-3-2	Rehabilitasi saluran utama																								

Gambar 8.1.4 Jadwal Pelaksanaan Komponen 4

Komponen 5: Pembuatan Jaringan Pemantauan

Program Prioritas		Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Tahun VI			Tahun VII					
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 5: Pembuatan jaringan pemantauan																									
5-1	Pembuatan sistem pemantauan hidrologi																								
5-1-1	Survei persediaan																								
5-1-2	Pendirian organisasi dan pengelolaan																								
5-1-3	Kapasitas bangunan																								
5-1-4	Konstruksi baru dan peningkatan fasilitas																								
5-1-5	Pemantauan																								
5-2	Pembuatan sistem pemantauan kualitas air																								
5-2-1	Koordinasi antara badan yang terkait																								
5-2-2	Persiapan rencana pemantauan																								
5-2-3	Pendirian laboratorium kualitas air di balai PSDA Musi																								
5-2-4	Pemantauan																								
5-4	Pembuatan sistem data hidrologi																								

Gambar 8.1.5 Jadwal Pelaksanaan Komponen 5

Komponen 6: Perkuatan Institusional

Program Prioritas		Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Tahun VI			Tahun VII					
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 6: Penguatan kelembagaan																									
6-2	Publikasi trans paransi hubungan masyarakat																								
6-2-3	Pengelolaan web site resmi sumberdaya air																								
6-5	Perbaikan organisasi																								
6-5-1	Pendirian unit WRDI di Balai PSDA																								
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA secepat mungkin																								
6-6	Pengembangan sumberdaya manusia																								
6-6-1	Pelatihan operator teknis untuk Balai PSDA																								
6-6-2	Pelatihan untuk perencanaan dan pengelolaan																								
6-6-3	Pelatihan untuk O&M sistem irigasi																								
6-6-4	Pelatihan bersama LSM untuk pemimpin informal																								

Gambar 8.1.6 Jadwal Pelaksanaan Komponen 6

8.1.2 Organisasi Pelaksana dan Tugas-tugas

Tabel 8.1.1 menunjukkan matrik dinas/instansi pengelola, pendukung dan dinas terkait untuk setiap program prioritas.

Table 8.1.1 Instansi Pelaksana, Pendukung dan Instansi Terkait Lainnya

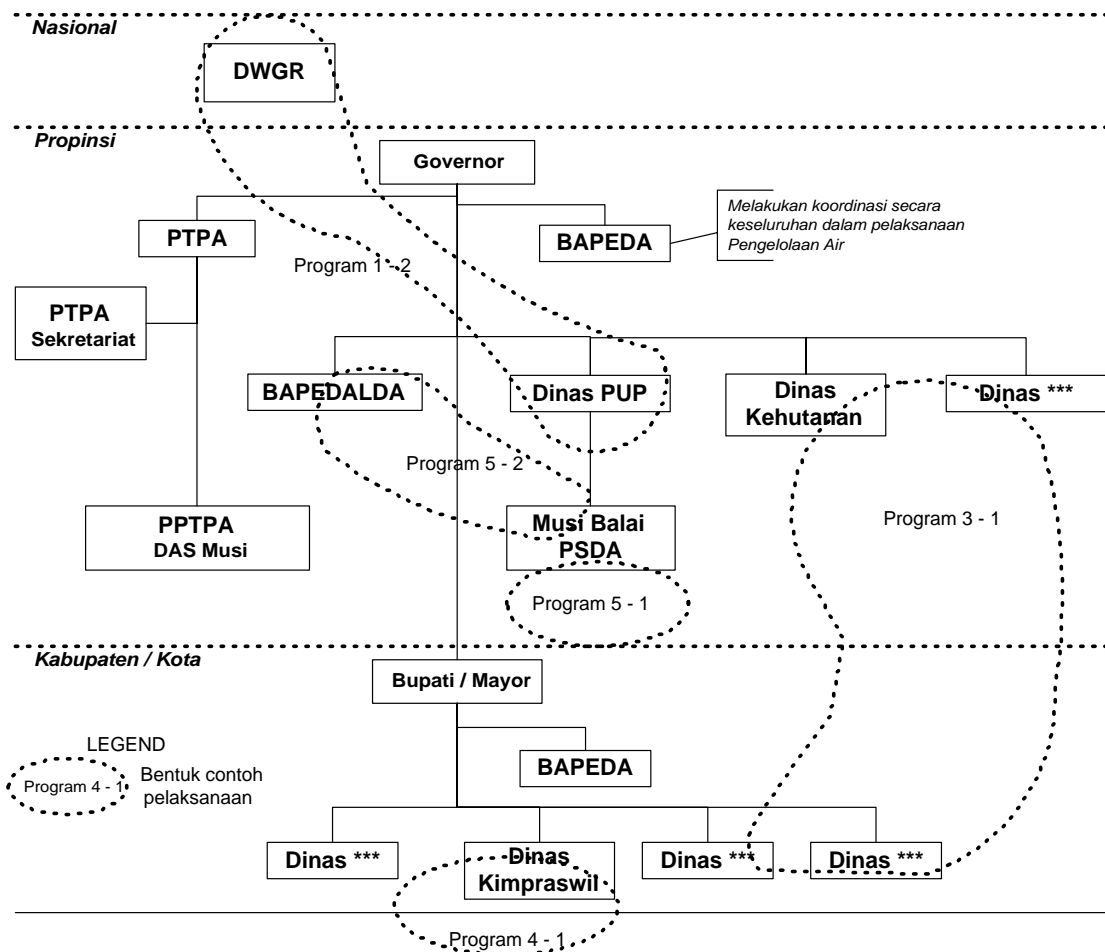
Komponen dan Program	DGWR	BMG	South Sumatra Province																Private Company/setup	Community/NGOs									
			Governor's Office	BAPPEDA	Dinas PUP	Balai PSDA	Forest Service	Agriculture Service	Estate Service	Fisheries Service	UPTD	Balai KSDA	BAPEDALDA	PDAMs	Other Provinces	Kota Palembang	Kab. Muba	Kab. Banyuasin			Kab. Muara Enim	Kota Perabumulih	Kab. Lahat	Kota Pagaralam	Kab. Mura	Kota Lubuk Linggau	Kab. Oki	Kab. Oku	
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air																													
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkelanjutan	A	B	B											B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
1-3	Pemanfaatan air hujan di area rawa pasang-surut				A											B	B								B				
1-4	Pengelolaan budi daya air				A		B		B						B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B		
1-6	Pembentukan pengelolaan sumberdaya air	A	C		B	C				C					B														
Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir																													
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan penetapan wilayah				B	A	B	B								C	C		C		C		C		C				
Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Perairan Sungai																													
3-1	Aplikasi hutan pertanian di perkebunan petani						A	B	B										B		B		B		B				
3-3	Penguatan penyuluhan pertanian /perumahan /hutan yang ada						A	B	B										B		B		B		B				
3-4	Penghijauan hutan produksi						A									B	B	B		B		B		B		B	B	B	C
3-6	Koordinasi bagian dalam dan antar DAS			A											B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada						B				A					B	B	B		B									C
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota																													
4-1	Pengelolaan drainase masyarakat															A													B
4-3	Rehabilitasi saluran drainase															A													
Komponen 5: Pembentukan Jaringan Pemantauan																													
5-1	Pembentukan Pemantauan Sistem Hidrologi		B			A										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5-2	Pembentukan Pemantauan Kualitas Air					A					B	B			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5-4	Pembuatan Database Hidrologi		B			A					B	B																	
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan																													
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumberdaya air					A																							
6-5-1	Pembentukan Unit Informasi dan Data Sumberdaya Air di Balai PSDA					A	B																						
6-5-3	Aktivitas PTPA/PPTPA			A		B									B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
6-6-1	Pelatihan teknis pelaksanaan bagi pegawai pemerintahan Balai PSDA					A																							
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan untuk pegawai pemerintah terkait					A																							
6-6-3	Pelatihan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi					A		B																					
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM dengan tokoh masyarakat dan orang yang dipilih					A																							B

Catatan : A: Instansi yang berwenang; B: Instansi yang mendukung; C: Instansi terkait

BAPPEDA Propinsi Sumatra Selatan seharusnya melakukan koordinasi secara keseluruhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Air secara Menyeluruh. Diharapkan untuk tetap melakukan pertemuan yang diadakan oleh BAPPEDA untuk mengevaluasi kemajuan dan masalah dalam pelaksanaan rencana pengelolaan yang diajukan. Seluruh organisasi terkait terlibat dalam pelaksanaan setiap komponen program pengelolaan air.

Gambar 8.1.7 menunjukkan bentuk yang berbeda dari pelaksanaan program prioritas. Beberapa program akan dilaksanakan terutama oleh suatu organisasi tersendiri, dan lainnya akan dilaksanakan melalui koordinasi antara seluruh organisasi terkait. **Tabel 8.1.2** menjelaskan tugas-tugas setiap dinas bersangkutan dalam pelaksanaan setiap program.

Biaya program prioritas telah diperkirakan. Biaya seluruhnya setiap sub-program dihadirkan dalam **Tabel 8.2.1**, juga perincian dihadirkan dalam setiap bagian laporan.



Gambar 8.1.7 Bagan Dinas Terkait dalam Pelaksanaan Program Prioritas

Antara lain, tugas-tugas organisasi utama dalam pelaksanaan pengelolaan air dirangkum sebagai berikut (dalam paragraf ini, pengelolaan air di DAS Musi):

- Gubernur Propinsi Sumatra Selatan: Bertanggung jawab dalam pengelolaan air secara menyeluruh pada DAS Musi.
- PTPA: Membuat rekomendasi kepada Gubernur dalam hal mengumumkan Peraturan Pemerintah yang Baru mengenai Sumber Daya Air.
- BAPPEDA: Melaksanakan koordinasi dan menindaklanjuti secara keseluruhan dalam pelaksanaan pengelolaan air.

- Dinas PU Pengairan: Bertindak sebagai organisasi pemimpin dalam pelaksanaan rencana pengelolaan air yang diajukan.
- Musi Balai PSDA: Bertindak sebagai operator dalam pengelolaan air.
- Dinas Kehutanan: Bertindak sebagai organisasi pemimpin dalam pelaksanaan komponen 3: Perbaikan dan Rehabilitasi DAS.
- DGWR Kimpraswil: Bertindak sebagai organisasi pemimpin dalam pelaksanaan program-program nasional.

Tabel 8.1.2 Tugas-tugas setiap dinas dalam pelaksanaan program prioritas

Komponen dan Program	
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air	
1 - 2	Pengembangan Rawa dan Irigasi secara berkesinambungan <ul style="list-style-type: none"> - DGWR: Mengkoordinir strategi nasional untuk swasembada pangan, melaksanakan Pra-F/S, F/S dan D/D bekerja sama dengan Dinas PUP, Sumsel. - Dinas PUP, Sumsel: Menyusun rencana pencapaian dan pembangunan; Melaksanakan konsultasi publik tingkat Propinsi; melaksanakan Pra-F/S, F/S dan D/D. - Kantor Gubernur, Sumsel: Menetapkan target dan mensosialisasikannya - Kab./Kota: Melaksanakan konsultasi publik tingkat Kab./Kota; Mendukung pelaksanaan Pra-F/S, F/S dan D/D - WUA: Mendukung konsultasi publik dan pelaksanaan Pra-F/S, F/S dan D/D
1 - 3	Penggunaan air hujan di daerah rawa pasang surut <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUP, Sumsel: Bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan persiapan dan PKM - Pemerintah Kab. OKI, Muba (baru), Banyuasin: Melaksanakan persiapan; Menjalankan pelaksanaan
1 - 4	Pengelolaan budidaya air <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUP, Sumsel: Melakukan penelitian metode solusi; Menginformasikan metode tersebut - Dinas Pertanian dan Perikanan, Sumsel: Membantu Dinas PUP dalam penelitian metode solusi - Dinas Kimpraswil Palembang, Muba, Banyuasin, Muaraenim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Mura, Lubuk Linggau, Oki, Oku, Rejang L.: Membantu Dinas PUP dalam penelitian metode solusi dan menginformasikan metode tersebut.
1 - 6	Pembuatan model pengelolaan tata guna air <ul style="list-style-type: none"> - DGWR: Melaksanakan program - Dinas PUP, Sumsel: Terlibat dalam pelaksanaan program - BMG: Mendukung DGWR dan Dinas PUP dengan cara memberi data yang diperlukan - Dinas Kehutanan, Sumsel: Mendukung DGWR dan Dinas PUP dengan memberi informasi tata guna lahan - UPTD: Membantu pelaksanaan program
Komponen 2 : Pengelolaan Dataran Banjir	
2 - 1	Program pembagian wilayah dan pengawasan tata guna lahan <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUP, Sumsel: Mempersiapkan peta untuk area kontrol tata guna lahan - Balai PSDA: Membantu mempersiapkan peta untuk area kontrol tata guna lahan - Dept. Kehutanan, Sumsel: Membantu mempersiapkan peta untuk area kontrol tata guna lahan - BAPPEDA, Sumsel: Penataan wilayah - Pemerintah Palembang, Muba, Muaraenim, Lahat, Mura, Oki: Melaksanakan penataan wilayah; Pemberlakuan peraturan

Komponen 3 : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Air

- 3 - 1 Penerapan budidaya hutan pada perkebunan rakyat
- **Dinas Kehutanan, Perumahan dan Pertanian, Sumsel dan Bengkulu:** Bertanggung jawab dalam mempersiapkan garis besar secara umum, mempersiapkan anggaran, dan penentuan tenaga ahli lapangan
 - **BAPPEDA, Sumsel, Bengkulu dan Kab. Muaraenim, Lahat, Mura, Oku:** Bertanggung jawab dalam pelaksanaan legislatif untuk peraturan tata guna lahan.
 - **Dinas Kehutanan, Perumahan dan Pertanian Kab. Muaraenim, Lahat, Mura, Oku, dan Kec. Terkait:** Bertanggung jawab dalam pemilihan area prioritas, perencanaan proyek, penentuan pedoman teknik untuk penyuluhan
 - **Dinas Penyuluhan Kehutanan, Perumahan dan Pertanian:** Bertanggung jawab dalam membantu perencanaan proyek, bekerja sama dengan petani dalam pelaksanaan proyek, pengamatan dan laporan yang diterima dari proyek kepada tingkat dinas yang lebih tinggi
- 3 - 3 Penguatan dari penyuluhan pertanian/perkebunan/perhutanan
- **Dinas Kehutanan, Perumahan dan Pertanian, Sumsel dan Bengkulu:** Bertanggung jawab dalam mempersiapkan garis besar secara umum, mempersiapkan anggaran, dan penentuan tenaga ahli lapangan
 - **Dinas Kehutanan, Perumahan dan Pertanian Kab. Muaraenim, Lahat, Mura, Oku, dan Kec. Terkait:** Bertanggung jawab dalam penentuan pedoman teknik untuk penyuluhan
- 3 - 4 Reboisasi hutan produksi
- **Dept. Kehutanan Sumsel, Bengkulu:** Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
 - **Polisi Kehutanan:** Bertanggung jawab dalam menegakkan undang-undang kehutanan yang melawan tindakan ilegal
 - **Pemerintah Muba, Banyuasin, Muaraenim, Lahat, Mura, Oki, Oku:** Bertanggung jawab mengawasi hutan produksi
 - **Dinas Penyuluhan Pertanian:** Bertanggung jawab mengawasi hutan produksi
 - **Badan Swasta (Perambangan):** Melaksanakan penghijauan
- 3 - 6 Koordinasi di dalam dan antar wilayah DAS
- **Kantor Gubernur, Sumsel:** Bertanggung jawab dalam bergeraknya MUSI PIPA
 - **Pemerintah Palembang, Muba, Banyuasin, Muaraenim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Mura, Lubuk Linggau, Oki, Oku:** Bertanggung jawab dalam sub-DAS tingkat organisasi yang sama kepada PIPA
- 3 - 7 Rehabilitasi hutan lindung yang ada
- **Balai KSDA, Sumsel:** Bertanggung jawab dalam pengembangan program, penetapan anggaran, pemilihan area prioritas, penentuan tenaga ahli lapangan, bangunan pembatas hutan, evaluasi hasil pengamatan
 - **Forest Office, Sumsel:** Bertanggung jawab dalam membantu persiapan perawatan, pengiriman bibit, penegakan hukum melawan penebangan kayu ilegal
 - **Dinas Penyuluhan pada Hutan Lindung:** Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, bekerja sama dengan masyarakat setempat, pengawasan habitat dan kondisi hutan, pelatihan penduduk lokal sebagai pekerja.

Komponen 4 : Perbaikan Lingkungan Air Kota

- 4 - 1 Pengelolaan drainase masyarakat
- **Dinas Kimpraswil, Palembang:** Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
 - **LSM:** Berpartisipasi dalam pelaksanaan program
 - **Dinas PUP, Sumsel:** Memberi masukan atas permintaan
- 4 - 3 Rehabilitasi saluran drainase utama
- **Dinas Kimpraswil, Palembang:** Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program.
 - **Dinas PUP, Sumsel:** Memberi masukan atas permintaan

Komponen 5 : Pembuatan Jaringan Pemantauan	
5 - 1	Pembuatan sistem pemantauan hidrologi - Musi Balai PSDA : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program - Dinas Kimpraswil Palembang, Muba, Banyuasin, Muaraenim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Mura, Lubuklinggau, Oku, Oki : Bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengawasan kerja - BMG : Bekerja sama dalam penentuan data curah hujan DAS Musi
5 - 2	Pembentukan sistem pemantauan kualitas air - Musi Balai PSDA : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program - Dinas Kimpraswil Palembang, Muba, Banyuasin, Muaraenim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Mura, Lubuklinggau, Oku, Oki : Bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengawasan kerja - BAPEDALDA dan PDAM tingkat Propinsi dan Kota : Bekerja sama dalam penentuan data kualitas air dan melaksanakan pengawasan kerja
5 - 4	Pembentukan database hidrologi - Musi Balai PSDA : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
Komponen 6 : Penguatan Kelembagaan	
6-2-3	Pengelolaan web site resmi sumberdaya air - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
6-5-1	Pendirian unit WRDI di Balai PSDA - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program - Musi Balai PSDA : Bertanggung jawab dalam pengoperasian Unit Informasi dan Data Sumberdaya Air
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA secepat mungkin - Kantor Gubernur, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
6-6-1	Pelatihan operator teknis untuk balai PSDA - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
6-6-2	Pelatihan untuk perencanaan dan pengelolaan pegawai pemerintah terkait - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
6-6-3	Pelatihan untuk O&M sistem irigasi - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program - Dinas Pertanian, Sumsel : Bekerja sama dalam pelaksanaan program - P3A : Bekerja sama dalam pelaksanaan program
6-6-4	Pelatihan bersama LSM dengan tokoh masyarakat dan orang yang dipilih - Dinas PUP, Sumsel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program - LSM : Berpartisipasi dalam pelaksanaan program

Perlunya koordinasi dengan program dan proyek terkait lainnya dijelaskan dalam **Tabel 8.1.3**.

Tabel 8.1.3 Koordinasi dengan Program/Proyek Terkait Lainnya

Komponen dan Program		DGWR	IWIRIP	WISMP
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air				
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara terus-menerus	Penyesuaian dengan kebijakan nasional	Program di Muba dan Oku	Program di Muba dan Oku
1-3	Pemanfaatan air hujan di area rawa pasang-surut			
1-4	Pengelolaan budi daya air			
1-6	Pemodelan pengelolaan sumber daya air	Penyesuaian dengan aplikasi DAS lainnya		

Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir				
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan zonasi wilayah			
Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Perairan Sungai				
3-1	Penerapan hutan tanaman di perkebunan petani			
3-3	Memperkuat penyuluhan pertanian /perkebunan /kehutanan			
3-4	Penghijauan hutan produksi			
3-6	Koordinasi bagian dalam dan antar DAS			Dipantau oleh WISMP
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada			
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota				
4-1	Pengelolaan drainase masyarakat			
4-3	Rehabilitasi saluran drainase	Penambahan anggaran		
Komponen 5 : Pembentukan Jaringan Pemantauan				
5-1	Pembentukan Pemantauan Sistem Hidrologi		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
5-2	Pembentukan Pemantauan Kualitas Air	Pemilihan sumber keuangan	Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
5-4	Pembuatan Database Hidrologi		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan				
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
6-5-1	Pembentukan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air di Balai PSDA		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA sesegera mungkin			Dipantau oleh WISMP
6-6-1	Pelatihan teknis pelaksanaan bagi pegawai pemerintahan Balai PSDA		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan untuk pegawai pemerintah terkait		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
6-6-3	Pelatihan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM, tokoh masyarakat dan orang yang dipilih		Penyelesaian melalui IWIRIP	Program di dalam WISMP

8.1.3 Prasyarat yang diperlukan

Prasyarat yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Air secara Menyeluruh pada DAS Musi adalah sebagai berikut:

- Penegakan kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Indonesia
- Pelaksanaan Undang-undang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumberdaya Air yang baru.

8.2 Perkiraan Biaya

Biaya untuk program prioritas telah diperkirakan. Total biaya untuk setiap sub-program diperlihatkan pada **Tabel 8.2.1**, sedangkan perincian dibuat dalam laporan setiap sektor. **Tabel 8.2.1** juga memperlihatkan jumlah biaya yang dibebankan kepada setiap organisasi terkait.

Tabel 8.2.1 Biaya Program Utama

Komponen dan Program		Biaya		
		Pelaks. (Rp. Mil)	O&M (Rp Mil/year)	Biaya oleh Dinas (Kira ² Rp. Mil.)*1
Komponen 1: Pengelolaan Sumber Air				
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkesinambungan	108.835		DGWR: keseluruhan
1-3	Pemanfaat air hujan di area rawa pasang-surut	198.700		Dinas PUP: 1.800;Oki: 19.700;Muba 49.200; Banyuasin: 128.000
1-4	Pengelolaan budi daya air	73	6	Dinas PUP: keseluruhan
1-6	Pemodelan pengelolaan fungsi air	13.545	12	DGWR
Komponen 2: Pengelolaan Dataran Bujur				
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan zonasi wilayah	78		Dinas PUP: keseluruhan
Komponen 3: Perbaikan dan Rehabilitasi DAS				
3-1	Penerapan hutan pertanaman di perkebunan rakyat	45.511		Dinas Kehutanan: 2,155: Jumlah sisa untuk pemerintah Muaraenim, Lahat, Mura, Oku (ditetapkan dalam tingkat perencanaan)
3-3	Memperkuat perluasan budi daya pertanian /perkebunan /hutan	6.663		Besarnya jumlah diberikan kepada pemerintah Muaraenim, Lahat, Mura, Oku (ditetapkan dalam tingkat perencanaan)
3-4	Penghijauan hutan produksi/ wilayah hutan	88		Dinas kehutanan: keseluruhan
3-6	Koordinasi dalam DAS dan antar DAS			
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada	13.487		KSDA untuk administrasi: Dinas Kehutanan: 9,319 dan 4,168 untuk pemerintah Muba, Banyuasin, Muaraenim, Lahat
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota				
4-1	Pengelolaan Drainase Masyarakat	440		Dinas Kimprasiwil, Palembang : keseluruhan
4-3	Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	33.495		Dinas Kimprasiwil, Palembang : keseluruhan
Komponen 5: Pembuatan Jaringan Pemantauan				
5-1	Pembuatan sistem pemantauan Hidrologi	2.548		Musi BPSDA: keseluruhan
5-2	Pembentukan sistem pemantauan kualitas Air	6.084		Musi BPSDA: keseluruhan
5-4	Pembuatan Database Hidrologi	403		Musi BPSDA: keseluruhan
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan				
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air	205	72	Dinas PUP: keseluruhan
6-5-1	Pembuatan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	-		
6-5-3	Pengaktifan PTPA/PPTPA	-		
6-6-1	Pelatihan teknik operasi untuk tenaga kerja pemerintah Balai PSDA	45		Dinas PUP: keseluruhan
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan bagi tenaga kerja pemerintah	45		Dinas PUP: keseluruhan
6-6-3	Pelatihan operasi & pemeliharaan sistem irigasi	722		Dinas PUP: keseluruhan
6-6-4	Pelatihan bersama LSM, tokoh masyarakat dan orang terpilih	128		Dinas PUP: keseluruhan

Catatan : pelaks.: pelaksanaan

Anggaran biaya tahunan yang dibutuhkan diperlihatkan pada Tabel 8.2.2

Tabel 8.2.2 Anggaran Tahunan

(Satuan : Rp. juta)

Komponen dan Program		Badan Berwening	Tahun							Sesudah
			1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	
Komponen 1: Pengelolaan Sumber Air										
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkesinambungan	DGWR	664	1.270	0	14.000	7.000	13.650	27.300	40.950
1-3	Pemanfaat Air Hujan di area rawa pasang-surut	DPUP	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	59.610
1-4	Pengelolaan Budi Daya Air	DPUP	36	37	6	6	6	6	6	→
1-6	Pemodelan pengelolaan fungsi air	DGWR	6.773	6.772	12	12	12	12	12	→
Komponen 2: Pengelolaan Dataran Bujur										
2-1	Program Pengendalian Tata Guna Lahan dan zonasi wilayah	DPUP	0	539	1.149	1.149	28.389	7.142	7.142	
Komponen 3: Perbaikan dan Rehabilitasi DAS										
3-1	Penerapan hutan pertanaman di perkebunan rakyat	Hutan	0	539	1.149	1.149	28.389	7.143	7.142	
3-3	Memperkuat penyuluhan budi daya pertanian /perkebunan /hutan	Hutan	-	-	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	
3-4	Penghijauan hutan produksi	Hutan	29	29	30					
3-6	Koordinasi dalam DAS dan antar DAS	Gub.	-	-	-	-	-	-	-	
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada	BKSD	319	319	1.284	1.284	1.209	1.209	7.863	
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota										
4-1	Pengelolaan Drainase Masyarakat	Palemb.		220	220					
4-3	Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	Palemb.	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	10.050
Komponen 5: Pembuatan Jaringan Pemantauan										
5-1	Pembuatan sistem pemantauan Hidrologi	BPSDA	800	600	1.148	98	98	98	98	→
5-2	Pembentukan sistem pemantauan kualitas Air	BPSDA		3.042	3.042	291	291	291	291	→
5-4	Pembuatan Database Hidrologi	BPSDA	100	303	125	125	125	125	125	→
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan										
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air	DPUP	205	72	72	72	72	72	72	→
6-5-1	Pembuatan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	DPUP	-	-	-	-	-	-	-	-
6-5-3	Pembuatan PTPA/PPTPA sesegera mungkin	Gub.	-	-	-	-	-	-	-	-
6-6-1	Pelatihan teknik operasi untuk tenaga kerja pemerintah Balai PSDA	DPUP	45							
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan bagi tenaga kerja pemerintah	DPUP	45							
6-6-3	Pelatihan operasi & pemeliharaan sistem irigasi	DPUP	242	242	24					
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM, tokoh masyarakat dan orang yang dipilih	DPUP	128							

Note: mil: miliar; DPUP: Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan; Hutan: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan; Gub.: Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, BKSDA: Balai KSDA Propinsi Sumatera Selatan; Palemb.: Kota Palembang, BPSDA: Balai PSDA Musi

8.3 Evaluasi Program

Evaluasi Proyek telah dilakukan untuk program pokok yang dipilih dari segi teknis, ekonomi, keuangan, dan sosial. Seluruh program pokok untuk pengelolaan air secara umum DAS Musi adalah dasar untuk pengelolaan yang tepat, sehingga dapat dikatakan program ini telah dirumuskan sehingga tidak memberikan akibat negatif yang berarti di setiap aspek. Hasil evaluasi setiap program dirangkum seperti yang diperlihatkan dalam **Tabel 8.3.1**

Keseluruhan evaluasi untuk semua Rencana Pengelolaan Air secara Menyeluruh telah disusun sebagai berikut:

Rencana Induk yang disusun adalah pengelolaan air secara menyeluruh yang mencakup berbagai sektor dan terdiri dari berbagai komponen, sehingga evaluasi aspek teknik, ekonomi, finansial dan sosial perlu dilaksanakan terhadap program prioritas yang terpilih. Kondisi berikut dipertimbangkan dalam evaluasi.

- Semua program prioritas dalam pengelolaan air secara menyeluruh di daerah aliran Sungai Musi pada dasarnya diperuntukkan bagi pengelolaan air yang tepat di wilayah DAS Musi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa program-program prioritas tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berarti dalam segala aspek.
- Program prioritas telah dipilih dari berbagai program pada setiap komponen kegiatan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti prasyarat bagi program yang lain, keseriusan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan untuk dilaksanakan lebih awal, skala biaya. Sehingga, program prioritas yang terpilih adalah program-program yang perlu segera dilaksanakan, dan evaluasi teknik, ekonomi, finansial dan lingkungan telah dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi berikut ini.
- Aspek Teknik: Kegiatan-kegiatan dalam setiap program prioritas diajukan dengan memperhatikan aspek teknik yang penting seperti telah diuraikan pada laporan setiap sektor. Perhatian harus diberikan kepada program-program yang membutuhkan teknologi tinggi dibandingkan dengan program-program yang telah umum diterapkan di Indonesia.

Aspek Ekonomi: Analisis ekonomi kuantitatif seperti EIRR, B/C ratio and Net Present Value, telah dilakukan untuk program-program yang tepat dengan metode analisis ini. Untuk program-program prioritas yang lain, dampak ekonomi yang diharapkan melalui pelaksanaan program-program tersebut telah diidentifikasi secara kualitatif.

- Aspek Finansial: Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap program telah dibandingkan dengan anggaran yang tersedia pada institusi pelaksana, dan sumber anggaran telah dikaji apakah APBD saja telah cukup atau diperlukan tambahan dari APBN, termasuk bantuan luar negeri.

- **Aspek Sosial dan Lingkungan:** Semua program prioritas pada dasarnya merupakan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. Aspek sosial dan lingkungan telah diuraikan secara kualitatif dan telah diuji dengan menggunakan beberapa faktor lingkungan.

Ringkasan hasil evaluasi dari setiap program disajikan pada **Tabel 8.3.1**, sedangkan pembahasannya secara terinci disajikan pada Laporan Sektor. Evaluasi secara menyeluruh untuk Rencana Pengelolaan Air Secara Komprehensif telah disusun sebagai berikut ini.

Aspek Teknik: Program pengembangan rawa dan irigasi secara terus-menerus berisi Pre-F/S, F/S dan D/D untuk pengembangan skala besar, yang sering menggunakan konsultan internasional dan diharapkan untuk dilaksanakan dengan cara yang sama. Pemodelan program pengelolaan penggunaan air menggunakan teknologi tinggi dan bantuan teknik dari negara maju yang memiliki banyak pengalaman di bidang pemodelan pengelolaan DAS pada daerah Asia Tropis. Diharapkan tidak ada masalah teknik yang serius pada program lainnya.

Aspek Ekonomi: Analisis kuantitatif telah dilakukan terhadap Penggunaan Air Hujan di Daerah Pasang Surut, dan terhadap Program Drainase di Kota Palembang (lihat **Tabel 8.3.1** untuk nilai EIRR, dll.). Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah: peningkatan produksi pangan setelah pelaksanaan program, perbaikan lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi/DAS dari komponen kegiatan 1; Pencegahan peningkatan kerusakan akibat banjir dari komponen 2; Penghematan biaya, meningkatkan produksi pertanian secara diversifikasi dan penghijauan dari komponen 3; Pengurangan kerusakan banjir dan penyakit karena air dari komponen 4; Pemantauan kualitas air dan hidrologi, dan pembentukan database dari komponen 5; dan Penghematan biaya komunikasi, pengumpulan data dan penggunaan air dan pengembangan sumber daya air dari komponen 6. Sebagai hasilnya, beberapa program memberikan efek ekonomi secara langsung dan lainnya tidak secara langsung. Keuntungan di bidang ekonomi, secara langsung dan tidak langsung diperhatikan secara luas. Evaluasi ekonomi dengan perbandingan keuntungan dan biaya akan dilakukan dalam bagian pelaksanaan.

Aspek Keuangan: Evaluasi keuangan program dilakukan dari sudut pandang dari dinas pemerintah terkait untuk memberitahu kemajuan pelaksanaan program. Kemajuan ini dipelajari dengan membandingkan ukuran anggaran tahunan dan biaya program tahunan. Sebagai hasilnya, beberapa program dapat dilaksanakan dengan menggunakan APBD dan sedikit masukan dana tambahan yang dibutuhkan dari APBN. Bagi APBN, dana tambahan dari negara-negara lainnya dalam bentuk pinjaman atau bantuan dana juga dipertimbangkan.

Aspek Sosial dan Lingkungan: Berbagai program telah diajukan dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat, umumnya tidak ditemukan dampak negatif yang serius, sebaliknya banyak dampak positif yang diharapkan dapat terjadi (penguatan solidaritas sosial dari komunitas lokal, dll.). Konservasi dan rehabilitasi lingkungan adalah satu dari tujuan penyusunan Rencana Induk dan banyak manfaat terhadap

lingkungan yang dapat diperoleh (rehabilitasi ekosistem asli dan keanekaragaman hayati, dll). **Tabel 8.3.2** menyajikan penjarangan dampak awal terhadap lingkungan.

Tabel 8.3.1 Evaluasi Program Prioritas

Evaluation (a: Technical, b: Economic, c: Financial, d: Social and Environmental)	
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air	
1-2 Pengembangan Rawa dan Irigasi secara berkesinambungan	<p>a. Program ini mempelajari dan mengkaji dalam penetapan sasaran produksi beras dan melaksanakan Pre-F/S, F/S, dan D/D sebagai pelaksanaan umum di Indonesia menggunakan konsultan Internasional dan tidak ada masalah serius yang ditemukan.</p> <p>b. Program ini tidak langsung menghasilkan efek ekonomi, tetapi pelaksanaan program akan menjadi masukan yang penting untuk pelaksanaan proyek ke depan dalam peningkatan produksi beras.</p> <p>c. Total biaya yang dibelanjakan adalah Rp. 104,835 juta untuk 9 tahun tidak dapat dicukupi oleh belanja APBD Dinas PUP adalah Rp. 9,704 juta (2002). Masukan APBN termasuk dari bantuan dana negara lain dibutuhkan.</p> <p>d. Program ini untuk keamanan swasembada pangan dan beras, hal ini akan memberi keuntungan di bidang sosial yang luas di masa yang akan datang ketika pembangunan saat ini telah dilaksanakan, misalnya mem- buka lapangan pekerjaan baru, impor penggantian dengan beras dan peningkatan ekspor.</p>
1-3 Penggunaan air hujan di daerah rawa pasang surut	<p>a. Tanki air dan septic tank umumnya dibuat di Palembang dan mudah untuk diperoleh. Tidak ada kesulitan teknik.</p> <p>b. Analisis ekonomi menunjukkan nilai EIRR sebesar 10.7%, B/C ratio dan NPV pada tingkat suku bunga adalah 0.93 dan Rp.-8,215 juta. Walaupun nilai EIRR sedikit lebih rendah daripada tingkat suku bunga di Indonesia, pelaksanaan program ini sangat direkomendasikan dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan untuk mengatasi ketimpangan di wilayah sekitar DAS.</p> <p>c. Anggaran tahunan Rp. 19,870 juta adalah kurang dari 4% dari total belanja APBD Sumsel, Muba, dan Oki sekitar Rp. 548,700 juta sehingga dari aspek keuangan dinilai cukup.</p> <p>d. Keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari di musim kemarau di wilayah pasang surut adalah salah satu permasalahan sosial yang paling serius di DAS. Sehingga manfaat sosial kegiatan ini dinilai sangat besar seperti peningkatan kesehatan masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi dan stabilitas sosial, memberikan dampak positif kepada penduduk asli, menurunkan limbah dan kotoran, meningkatkan kualitas air setempat.</p>
1-4 Pengelolaan budidaya air	<p>a. Pergantian dan pemindahan area sawah diantisipasi tidak menimbulkan masalah teknik yang serius.</p> <p>b. Program ini tidak secara langsung menguntungkan di bidang ekonomi tetapi diharapkan akan terjadi peningkatan produksi budi daya air dan irigasi ketika pelaksanaannya dilakukan mengikuti metode yang dianjurkan.</p> <p>c. Biaya tahunan Rp. 37 juta dapat dicukupi oleh APBD Dinas PUP sekitar Rp. 9,074 juta (2002)</p> <p>d. Dampak sosial yang nyata seperti stabilitas kehidupan petani di pedesaan, mengatasi konflik sosial, dll., dampak yang tak diketahui meliputi relokasi tempat kegiatan, dampak terhadap kondisi hidrologi dan perubahan kualitas air.</p>
1-6 Pembuatan model pengelolaan tata guna air	<p>a. Program ini membutuhkan teknologi tinggi dan bantuan teknologi dari negara maju. Perhatian seharusnya diberikan kepada alih teknologi untuk operasi yang lebih tepat dan pemeliharaan sistem oleh dinas PUP.</p> <p>b. Program ini tidak secara lansung menghasilkan di bidang ekonomi tetapi akan menjadi dasar pengelolaan air secara tepat sehingga diharapkan pengembangan ekonomi di masa yang akan datang pada DAS.</p> <p>c. Total biaya Rp. 13,545 juta terlalu banyak dibandingkan dengan APBD Dinas PUP sekitar Rp. 9,704 juta (2002), APBN diharapkan.</p> <p>d. Model ini akan membantu dalam pembuatan keputusan, pegelolaan skenario, penilaian lingkungan hidup, dan kemudian membuat kondisi lingkungan hdup dan sosial lebih baik pada DAS.</p>

Komponen 2 : Pengelolaan Dataran Banjir
2-1 Program perwilayahan dan pengawasan tata guna lahan
a. Tidak ada masalah teknik pada penataan wilayah di daerah yang menggunakan gambar satelit karena sifatnya umum.
b. Keuntungan ekonomi meningkat karena pencegahan banjir pada derah hilir, pemeliharaan resim sungai saat ini dengan biaya sedikit tanpa investasi dalam jumlah yang besar seperti konstruksi dam.
c. Anggaran tahunan Rp. 39 juta dapat dipenuhi oleh Dinas PUP.
d. Konservasi lingkungan perairan beserta sumberdaya yang ada dan kualitasnya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal. Pindahan penduduk perlu dilakukan terhadap mereka yang mendiami suatu lokasi secara ilegal.
Komponen 3 : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Air
3-1 Penerapan budidaya hutan pada perkebunan rakyat
a. Dasar teknologi hutan pertanian seperti pemetakan dan diversifikasi telah dilakukan di Propinsi. Usaha pendidikan lebih dibutuhkan pelaksanaan secara tepat dan meluas.
b. Akhir program ini adalah mengurangi erosi tanah dan biaya pengerukan di hilir akan berkurang. Hasil diversifikasi akan memberi dampak positif bagi ekonomi pertanian.
c. Biaya yang dibutuhkan cukup besar bagi Dinas Kehutanan, Sumsel, demikian APBN dibutuhkan juga. Bantuan finansial dari daerah yang menghasilkan, sub-daerah, dan pertanian untuk penguatan kepemilikan seharusnya diperhatikan.
d. Pemilihan lokasi proyek dan koordinasi dengan masyarakat yang terlibat akan memberdayakan komunitas lokal dan akan memacu komunikasi publik. Ekosistem asli dan keanekaragaman hayati diharapkan dapat dipulihkan. Dampak yang belum diketahui meliputi kemungkinan pemindahan penduduk, perubahan gaya hidup, perubahan kebiasaan tradisional (perladangan berpindah) dll.
3-3 Penguatan dari perluasan pertanian/perkebunan/perhutanan
a. Dasar teknologi hutan pertanian seperti pemetakan dan diversifikasi telah dilakukan di Propinsi. Usaha pendidikan lebih dibutuhkan pelaksanaan secara tepat dan meluas.
b. Program ini diharapkan dapat membantu penduduk lokal melalui sumber penghasilan yang tetap dan mencukupi.
c. Anggaran tahunan sekitar 37% dari anggaran APBD Dinas Kehutanan, Sumsel. APBN dibutuhkan dan akan lebih baik bila dibagi untuk dinas terkait dan pemerintah setempat.
d. Dinas penyuluhan yang lebih kuat dan informatif akan membuat masyarakat lokal lebih banyak memberi masukan yang akan memperkuat kotamadya lokal dan meningkatkan komunikasi publik.
3-4 Reboisasi hutan produksi
a. Pemerintah Indonesia telah memiliki garis besar teknis yang baik untuk reboisasi hutan produksi.
b. Program ini akan menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat lokal selama periode reboisasi
c. Anggaran tahunan Rp. 30 juta akan ditutupi oleh APBD Dinas Kehutanan, Sumsel.
d. Penghijauan untuk hutan produksi yang menurun akan menampung tenaga masyarakat dari Propinsi yang besar. Hal ini akan memperbaiki ekosistem lokal dan daerah dan keanekaragaman hayati.
3-6 Koordinasi di dalam dan di luar wilayah DAS
a. Garis besar dan koordinasi teknis dan organisasional akan dipersiapkan oleh Pemerintah Nasional
b. Perhatian pada ekonomi lokal akan direfleksikan secara langsung pada rencana pengelolaan dan tata guna lahan di DAS.
c. Tidak ada jumlah yang signifikan dari penambahan anggaran
d. Program ini akan memberi dampak positif pada masyarakat lokal melalui koordinasi dari yang berkepentingan.
3-7 Rehabilitasi keberadaan hutan lindung
a. Pemerintah Indonesia telah memiliki garis besar teknis yang baik untuk reboisasi hutan produksi.
b. Program ini akan menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat lokal selama periode reboisasi
c. Masukan tambahan dari APBN diperlukan karena anggaran yang besar yaitu Rp 13,487 juta.
d. Pada saat hutan lindung yang ada masih memiliki area batas dimana masyarakat lokal tidak menyetujuinya, perundingan yang cermat dan langkah pemberian kelonggaran yang bisa diterima harus dilakukan untuk mengurangi masalah sosial.

Komponen 4 : Perbaikan Lingkungan Air Kota
4-1 Pengelolaan drainase masyarakat a. Tidak ada masalah serius pada bagian teknis b. Pelaksanaan program ini akan membawa berbagai dampak ekonomi seperti pengurangan kerusakan akibat banjir, penurunan kejadian penyakit akibat buruknya kualitas air, peningkatan kenyamanan kehidupan masyarakat. Program perbaikan sistem drainase Sungai Bendung dan Sungai Buah (Program 4-4) memiliki nilai EIRR sebesar 12.6%, B/C dan NPV sebesar 1.06 dan Rp.1,062 juta, sehingga Program 4-1 dinilai mendesak sebagai prasyarat bagi keseluruhan program perbaikan drainase di Kota Palembang. c. Pemenuhan anggaran tidak terlalu memberatkan Kota Palembang. Berbagai rencana yang tepat sebagai bantuan untuk kegiatan LSM sebaiknya dilakukan untuk menjadi perhatian. d. Diharapkan berdampak positif sosial, misalnya, penguatan solidaritas sosial di dalam masyarakat dan perbaikan kondisi sanitasi.
4-3 Rehabilitasi saluran drainase utama a. Tidak ada masalah serius pada bagian teknis b. Pelaksanaan program ini akan membawa berbagai dampak ekonomi seperti pengurangan kerusakan akibat banjir, penurunan kejadian penyakit akibat buruknya kualitas air, peningkatan kenyamanan kehidupan masyarakat. Program perbaikan sistem drainase Sungai Bendung dan Sungai Buah (Program 4-4) memiliki nilai EIRR sebesar 12.6%, B/C dan NPV sebesar 1.06 dan Rp.1,062 juta, sehingga Program 4-1 dinilai mendesak sebagai prasyarat bagi keseluruhan program perbaikan drainase di Kota Palembang. c. Anggaran tahunan yaitu 3,350 juta adalah 3% dari belanja pembangunan Kota Palembang. Tambahan masukan dari APBN akan lebih baik. d. Diharapkan adanya dampak positif pada masyarakat lokal, misalnya, perbaikan lingkungan air kota dan mengurangi genangan banjir.
Komponen 5 : Pembuatan Jaringan Pemantauan
5-1 Pembuatan sistem pemantauan hidrologi a. Pengukuran dengan peralatan baru menggunakan debit sedimen membutuhkan pelatihan bagi pegawai pengawas b. Usaha pengamatan itu sendiri tidak berdampak pada ekonomi secara langsung, tapi dapat menjadi dasar untuk pengelolaan yang membuat berbagai macam dampak positif pada ekonomi. c. Total anggaran yaitu Rp. 2,548 juta sulit bagi Musi BPSDA dan masukan tambahan dari APBN diperlukan. d. Diharapkan tidak ada dampak negatif sosial.
5-2 Pembentukan sistem pemantauan kualitas air a. Pelatihan pegawai laboratorium dan pengawas dibutuhkan b. Usaha pengamatan itu sendiri tidak berdampak pada ekonomi secara langsung, tapi dapat menjadi dasar untuk pengelolaan yang membuat berbagai macam dampak positif pada ekonomi. c. Total anggaran yaitu Rp. 6,084 juta sulit bagi Musi BPSDA dan masukan tambahan dari APBN diperlukan. d. Diharapkan tidak ada dampak negatif sosial.
5-4 Pembentukan database hidrologi a. Database GIS telah dibuat dan pelatihan telah dilaksanakan pada Studi. Database numerik dapat disiapkan oleh konsultan lokal. b. Pembuatan database sendiri tidak berdampak pada peningkatan ekonomi secara langsung, tapi ini akan menjadi dasar untuk pengelolaan yang menghasilkan berbagai dampak positif pada ekonomi. c. Total anggaran yaitu Rp. 403 juta sulit bagi Musi BPSDA dan masukan tambahan dari APBN diperlukan. d. Diharapkan tidak ada dampak negatif sosial.

Komponen 6 : Penguatan Kelembagaan	
6-2-3	Pengelolaan web site resmi sumberdaya air a. Tidak ada masalah teknis yang ditemukan b. Dampak positif termasuk; pengurangan biaya komunikasi, penggunaan air secara efektif, penghematan penggunaan air karena perhatian masyarakat. c. Diharapkan penggunaan APBD/APBN d. Diharapkan dampak positif sosial melalui peningkatan transparansi
6-5-1	Pendirian unit WRDI di Balai PSDA a. Tidak ada masalah teknis yang ditemukan b. Diharapkan penghematan waktu dan biaya pada pengumpulan informasi dan data, dll. c. Tidak ada jumlah yang signifikan dari penambahan anggaran d. Diharapkan dampak positif sosial melalui penyebaran data dan informasi yang tepat.
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA secepat mungkin a. Garis besar dan koordinasi teknis dan organisasional akan dipersiapkan oleh Pemerintah Nasional b. Program ini akan memberikan peningkatan hasil ekonomi Propinsi/DAS. c. Tidak ada jumlah yang signifikan dari penambahan anggaran d. Program ini memberikan dampak positif pada masyarakat lokal melalui pendahuluan sistem keterlibatan masyarakat.
6-6	Pengembangan Sumberdaya Manusia a. Tidak ada masalah teknis yang ditemukan b. Program ini tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung tetapi perbaikan kemampuan pegawai dan masyarakat terkait akan menjadi dasar bagi pengelolaan dan penggunaan air secara efisien c. Diharapkan penggunaan APBD untuk pelaksanaan WISMP d. Program ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan juga di dalam masyarakat lokal.

Tabel 8.3.2 Penyarangan Awal terhadap Dampak Lingkungan

Isu Lingkungan	Program Prioritas																	
	1-2	1-3	1-4	1-6	2-1	3-1	3-3	3-4	3-6	3-7	4-1	4-3	5-1	5-2	5-4	6-2-3	6-5-1	6-6
Isu Sosial																		
Pemindahan penduduk yang terjadual	D	D	C	D	C	C	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D
Pemindahan penduduk yang tak diinginkan	D	D	C	D	C	C	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan hak penguasaan lahan, tempat tinggal	D	D	C	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan gaya hidup	D	D	D	D	D	C	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D
Konflik antar penduduk	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Dampak terhadap penduduk asli, minoritas dan pendatang	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan kelembagaan dan kebiasaan tradisional	D	D	D	D	+	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Pembatasan hak perikanan, hak atas air, aturan setempat	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan struktur sosial, organisasi, dll.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan struktur sosial yang radikal, pertumbuhan penduduk	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Kehilangan kesempatan berproduksi, misal hilangnya lahan	D	D	D	C	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Pergeseran, konversi aktivitas ekonomi yang mendasar	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Peningkatan angka pengangguran	D	D	D	D	D	+	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Memperlebar perbedaan pendapatan	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Dampak terhadap transportasi yang telah ada	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Dampak terhadap sekolah dan rumah sakit	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Pemisahan masyarakat lokal akibat konstruksi jalan, dll.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Persepsi masyarakat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kesehatan dan higiene																		
Kejadian penyakit setempat	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D
Peningkatan kadar pestisida yang terkonsumsi	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Akumulasi residu bahan berbahaya	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Peningkatan limbah dan kotoran	D	+	D	D	+	D	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D
Pembuangan sampah, turunnya standar higiene	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D
Penyebaran organisme berbahaya	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Timbunan sampah konstruksi, tanah buangan, lumpur, dll.	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D
Peninggalan sejarah, budaya, bentang alam																		
Kerusakan peninggalan sejarah dan budaya	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya bentang alam yang berharga	D	D	D	D	D	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Dampak terhadap sumberdaya bawah tanah	D	D	D	D	+	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan sifat lahan akibat konstruksi bangunan	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Gangguan pemandangan yang harmonis akibat konstruksi bangunan	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Wilayah dengan fauna dan flora, dan ekosistem yang tak ternilai harganya																		
Perubahan vegetasi	D	D	D	D	D	+	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Invasi dan berkembangnya fauna dan flora yang berbahaya	D	D	D	D	D	+	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya/berkurangnya fauna and flora khas yang tak ternilai	D	D	D	D	D	+	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya lahan basah	D	D	D	D	+	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya keanekaragaman hayati	D	D	D	D	+	+	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya hutan hujan dan lahan liar	D	D	D	D	+	D	D	D	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Tanah dan lahan																		
Perubahan topografi dan geologi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perusakan lahan yang luas	D	D	D	D	D	+	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya kesuburan lahan	D	D	D	D	D	+	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Polusi tanah akibat rembesan air limbah yang beracun	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya lapisan tanah/erosi	D	D	D	D	+	+	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya humus (pasca penebangan hutan/konsolidasi lahan)	D	D	D	D	D	+	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya sifat lahan yang penting	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya sifat geologi penting akibat penebangan dan pembuatan tanggul	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Hidrologi dan kualitas air																			
Perubahan aliran/muka air	D	D	C	D	+	D	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D
Genangan dan banjir	D	D	C	D	+	+	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan aliran air tanah dan neraca air tanah	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Polusi atau penurunan kualitas air	D	+	C	D	+	+	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D
Air keruh akibat erosi tanah atau akibat kurangnya debit	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Hilangnya air tanah akibat pengambilan yang berlebihan atau akibat kurangnya debit masuk	D	D	D	D	+	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Mengalirnya air beracun yang berasal dari bahan yang dikubur	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Berkurangnya oksigen akibat timbunan bahan organik (eutrofikasi)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan temperatur air	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Danau dan sungai																			
Sedimentasi di danau	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Sedimentasi di sungai	D	D	D	D	+	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Penurunan dasar sungai	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Lain-lain																			
Peningkatan kemungkinan terjadinya longsor, kecelakaan	D	D	D	D	D	+	D	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Polusi akibat gas buang beracun dari kendaraan dan pabrik	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Kebisingan dan getaran akibat lalu lintas, pompa, dll.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Perubahan temperatur dan angin akibat pembangunan berskala besar	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Catatan: A: Ada dampak serius, perlu kajian yang cermat
 B: Ada dampak
 C: Tidak diketahui (perlu kajian, lebih detil perlu kajian lebih dalam)
 D: Tidak ada dampak
 +: Dampak, sasaran, atau tujuan program yang positif

8.4 Rencana Kegiatan pada Awal Pelaksanaan Pengelolaan

8.4.1 Rencana Kegiatan untuk Setiap Program Utama

Rencana kegiatan demi kelancaran pelaksanaan setiap program utama telah diajukan seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 8.4.1**.

8.4.2 Kegiatan Utama pada Awal Pelaksanaan Pengelolaan

Program-program prioritas telah dipilih dari program-program pada setiap komponen kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, misalnya, prasyarat pada program lainnya, keseriusan, kepentingan untuk dilaksanakan lebih awal, skala biaya. Program yang dipilih adalah program yang perlu segera dilaksanakan. Demi kelancaran awal pelaksanaan rencana pengelolaan, kegiatan kunci penting untuk diperhatikan. Kegiatan kunci adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan Persiapan

Diharapkan **BAPPEDA** Propinsi Sumatra Selatan bekerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

- Rencana Pengelolaan Air secara Menyeluruh yang diajukan akan disahkan pada Rencana Strategis, Propinsi Sumatra Selatan 2004 – 2008.
- Keputusan Pemerintah Propinsi untuk pelaksanaan rencana induk yang diajukan akan dipersiapkan dan diadopsi.

(2) Perangkat Dasar Pengelolaan Air

Program 1 – 6: Pembuatan model pengelolaan tata guna air adalah salah satu program penting yang paling mendesak sejak pembuatan model menjadi hal dasar dalam pengelolaan air secara tepat. Pelaksanaan program membutuhkan bantuan teknis dari negara maju dengan pengalaman yang lebih banyak dalam pembuatan model pengelolaan air DAS di daerah Asia Tropis. DGWR diharapkan untuk segera mempersiapkan TOR untuk bantuan teknis.

(3) Pembentukan Jaringan Pengamatan

Data kualitas air dan hidrologi dibutuhkan dalam Penyusunan Model Pengelolaan Penggunaan Air seperti telah didiskusikan di atas. Tanpa data ini, model pengelolaan tersebut tidak dapat digunakan secara tepat, sebab itu, kerja sama yang erat dalam penyusunan model pengelolaan air sangat dibutuhkan. Diharapkan supaya **Balai PSDA Musi** bekerja sama dengan Dinas PU Pengairan memulai diskusi dengan BMG, BAPPEDALDA, PDAM untuk jaringan pengamatan DAS di masa yang akan datang, dan mempersiapkan TOR untuk memperoleh dana dari APBN.

(4) Pengelolaan Dataran Banjir

Pengelolaan dataran banjir seharusnya diperhatikan sebagai program jangka panjang yaitu 50 – 100 tahun, tetapi harus dimulai secepatnya sebelum aktivitas yang tidak terkendali terjadi pada dataran banjir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa campur tangan **Dinas PU Pengairan** berpengaruh

besar pada masa depan DAS Musi. Diharapkan perumusan badan yang bertanggung jawab dibawah Dinas PU Pengairan segera dibentuk dan memulai kegiatan secara tepat.

(5) Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Dinas kehutanan Propinsi Sumatra Selatan dapat mengawali kegiatan dalam program konservasi dan rehabilitasi rawa bersih. Pembentukan gugus tugas dan pelaksanaannya dianggap sangat penting. Diharapkan untuk memulai diskusi bersama Kimpraswil untuk memasukkan DAS Musi ke dalam “Daftar DAS Utama untuk Penghijauan” yang dipersiapkan secara bersama-sama antara Departemen Kehutanan dan Kimpraswil.

(6) Perbaikan Lingkungan Air Kota

Dinas Kimpraswil Kota Palembang diharapkan untuk memulai pelaksanaan program. Pemilihan LSM yang akan terlibat dalam Program Pengelolaan Drainase Masyarakat dianggap sangat penting. Perencanaan yang tepat dalam membantu kegiatan LSM harus diperhatikan juga.

(7) Pembatasan Tugas yang dilakukan dalam WISMP

Dinas PU Pengairan diharapkan mengidentifikasi program yang dilaksanakan di bawah WISMP. Hal ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan demi kemajuan program di DAS Musi di bawah WISMP.

8.5 Ringkasan Program untuk Proyek Prioritas

Ringkasan program untuk prioritas disajikan pada **Tabel 8.4.1**.

Table 8.4.1 Rencana Kerja Pelaksanaan Program Prioritas

Komponen dan Program		Kegiatan Dimulai			Jangka Waktu Menengah Pemeriksaan	
		Waktu	Kegiatan	Organisasi Yang Berwenang	Waktu	Hal Yang Diperiksa
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air						
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkelanjutan	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.06	TOR untuk Pre-F/S dipersiapkan
1-3	Pemanfaatan Air Hujan di area rawa pasang-surut	2004.06	Awal perencanaan sumber keuangan	DPUP	2004.12	Sumber keuangan ditentukan
1-4	Pengelolaan budi daya air	2004.06	Penyelesaian survei pengumpulan data	DPUP	2004.09	Pertemuan pertama dilakukan antara P3A dan pemilik kolam
1-6	Pembentukan pengelolaan sumber daya air	2004.01	Persiapan TOR	DGWR	2004.09	Rencana pelaksanaan studi ditentukan
Komponen 2: Pengelolaan dataran Banjir						
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan zonasi wilayah	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.03	Gambar LANDSAT yang Penting dibeli
Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai						
3-1	Aplikasi hutan tanaman di perkebunan petani	2004.01	Pembentukan gugus yang harus dilakukan	Kehutanan	2005.12	Rencana proyek dirumuskan
3-3	Penguatan penyuluhan pertanian /perkebunan /hutan yang ada	2004.01	Pembentukan satuan tugas	Kehutanan	2004.12	Lokasi proyek ditentukan
3-4	Penghijauan hutan produksi	2004.01	Perumusan Tim Investasi	Kehutanan	2004.12	Perusahaan pelaksana diajukan
3-6	Koordinasi dalam dan antar DAS	2003.10	Pengesahan susunan PTPA/PPTPA	Gubernur	--	--
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di BKSDA	BKSDA	2005.12	Lokasi prioritas ditentukan
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota						
4-1	Pengelolaan drainase masyarakat	2003.10	Pemilihan LSM yang akan terlibat dalam program	Palembang	2004.01	Sumber keuangan ditentukan
4-3	Rehabilitasi saluran drainase	2003.10	Permintaan Anggaran program	Palembang	2004.01	Sumber keuangan ditentukan
Komponen 5: Pembentukan Jaringan Pemantauan						
5-1	Pembentukan Sistem Pemantauan Hidrologi	2004.04	Pengesahan program yang telah diselesaikan dalam IWIRIP dan program yang diajukan untuk WISMP	BPSDA	2004.06	Koordinasi antara BPSDA dan BMG dalam pertukaran data curah hujan diselesaikan
5-2	Pembentukan Sistem Pemantauan Kualitas Air	2004.04	Pengesahan program yang telah diselesaikan dalam IWIRIP dan program yang diajukan untuk WISMP	BPSDA	2004.06	Koordinasi antara BPSDA dan BAPEDALDA dalam pembatasan pengamatan kualitas air diselesaikan
5-4	Pembuatan Database Hidrologi	2004.01	Penyelesaian program kerja untuk Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	BPSDA	2004.03	Pengoperasian ACCESS database dimulai

Komponen dan Program		Kegiatan Dimulai			Jangka Waktu Menengah Pemeriksaan	
		Waktu	Kegiatan	Oraganisasi Yang Berwenang	Waktu	Hal Yang Diperiksa
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan						
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air	2003.10	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.09	Masa Percobaan diselesaikan
6-5-1	Pembentukan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air di Balai PSDA	2003.10	Pengesahan susunan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	DPUP	--	--
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA sesegera mungkin	2003.10	Pengesahan susunan PTPA/PPTPA	Gubernur	--	--
6-6-1	Pelatihan teknis pelaksanaan bagi pegawai pemerintah Balai PSDA	2003.10	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.01	Pelatihan dimulai
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan untuk pegawai pemerintah terkait					
6-6-3	Pelatihan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi					
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM tokoh masyarakat dan orang yang dipilih					

Catatan: mil: miliar; DPUP: Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan; Forest: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan; Gubernur: Gubenur Propinsi Sumatera Selatan, BKSDA: Balai KSDA Propinsi Sumatera Selatan; Palemb.: Kota Palembang, BPSDA: Balai PSDA Musi